PENGARUH *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Survei Pada Dinas SKPD Kabupaten Ciamis

PEMBIMBING:
Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini,S.E.,Spec.Lic
Inta Budi Setia Nusa, S.E.,M. Ak

OLEH:
WALA SITI NURLAELA

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

ABSTRACT

Implementation of good governance and accountability is very important to support the quality of performance of local government institutions. Performance of government institution is the achievements of activities, programs or policies in realizing the vision and mission of the organization. This study aims to determine the effect of good government governance and accountability on the performance of government institution areas in Ciamis district. Respondents of this study were 13 head of Dinas SKPD Ciamis District.

Method of the research used descriptive and verifikative method. Data was collected by distributing questionnaires to the respondents. This study used linear regression analysis. And statistical tests were performed using SPSS 20 for windows.

The results showed that the implementation of good government governance and accountability have a significant effect on the performance of government agencies. The performance of government agencies is good, if a local government can implement good governance and accountability optimally.

Keywords: good government governace (GGG); accountability; the performance of government agencies.

I. PENDAHULUAN

Isu mengenai kinerja pegawai pemerintah sangat menjadi sorotan publik saat ini, karena belum menampakkan hasil yang baik yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat menuntut agar pemerintah dapat mengelola dan menjalankan tugas pemerintahan dengan baik, sehingga dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mahsun (2006:4) mengatakan bahwa kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Berkaitan dengan pelaksanaan kinerja pegawai pemerintah di Indonesia, banyaknya kasus penyimpangan yang ditemukan, menyebabkan kekecewaan dan hilangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri.

Untuk mengembalikan dan bisa memulihkan kepercayaan masyarakat, tentunya diperlukan perubahan di segala bidang, yang tentunya bisa memperbaiki kualitas kinerja pemerintah itu sendiri. Akuntabilitas kinerja diperlukan sebagai pertanggung jawaban terhadap kinerja. Hasil kerja dari pegawai pemerintah dapat diketahui melalui informasi akuntabilitas dari masing-masing instansi pemerintah tersebut. Informasi tentang akuntabilitas diperlukan oleh pemerintah, karena berdasarkan informasi tersebut menjadi bahan pengambilan keputusan

pemerintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih baik. Informasi tersebut juga diperlukan sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban kepala pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat melalui DPR/D setiap akhir tahun anggaran dan diakhiri jabatan Kepala Pemerintah (Santosa, Urip dan Yohanes: 2008).

Selain akuntabilitas kinerja, untuk menunjang kualitas kinerja pegawai pemerintah diperlukan pula tata kelola pemerintah yang baik (*good government governance*). Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan pengaruh globalisasi menyebabkan banyaknya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah mengenai tata kelola pemerintah yang baik. Konsep *good governance* ini memiliki pengaruh dan peranan sangat penting dalam pelaksanaan kinerja pegawai pemerintahan. Oleh karena itu respon terhadap *good governance* ini sangat tinggi dan pegawai pemerintah pun cukup *concern* mengenai hal ini.

Good governance sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik atau sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran dari salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun *administrative*, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2006 dalam Dedi Kusmayadi 2009).

Untuk melaksanakan dan membangun prinsip tata kelola pemerintah yang baik tidak mudah. Ini memerlukan waktu yang lama dan usaha yang terus menerus. Selain itu, dalam implikasinya membutuhkan komitmen dan optimisme besar dari seluruh komponen bangsa, yang melibatkan tiga pilar bangsa yaitu aparat pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam rangka memelihara solidaritas untuk mencapai pemerintahan yang baik itu sendiri. (Leni Nofianti dan Novie Susanti Suseno, 2014)

Banyaknya kasus penyimpangan yang terjadi di kalangan pemerintah, menyebabkan krisis kepercayaan publik. Seperti banyak kasus korupsi, kolusi dan kasus penyimpangan lainnya yang tidak hanya di temukan dalam pemerintah pusat, tetapi juga banyak ditemukan di pemerintah daerah. Dari data yang diperoleh ICW pada tahun 2003 mengenai kejadian-kejadian korupsi di daerah, ditemukan 15 kasus korupsi yang terjadi di Jawa Barat salah satunya di pemerintah daerah kabupaten Ciamis. Wakil bupati kabupaten Ciamis diduga melakukan tindakan korupsi terhadap dana APBD kabupaten Ciamis tahun 2001/2002 saat ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ciamis periode 1999/2004.

Selain itu, fenomena yang terjadi di dinas Kabupaten Ciamis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Dadang Khaeruman (2013), yaitu terdapat masalah mengenai kualitas SDM di Dinas Kehutanan dan pekebunan kabupaten Ciamis. Hambatan yang dihadapi pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ciamis adalah Kualitas SDM yang masih kurang. Dengan kata lain SDM di dinas Kehutanan dan Perkebunan masih kurang dilihat dari profesionalismenya maupun di lihat dari jumlah pegawainya.

Hambatan lain adalah belum optimalnya sistem informasi manajemen Hutbun yang dapat dijadikan dasar perencanaan pembangunan kehutanan dan perkebunan yang baik dan benar. Selain itu data potesi Hutbun belum tersedia secara akurat sebagai bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dalam pengusahaan Hutbun. Pemanfaatan sumber daya hutan dan perkebunan cenderung masih kurang memperhatikan masyarakat sekitar hutan dan perkebunan telah memicu konflik sosial yang menimbulkan tuntutan untuk merambah kawasan hutan dan perkebunan. Kualitas pegawai Dishutbun belum memadai sesuai dengan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga yang optimal serta kemampuan pemerinta daerah untuk

membiayai pembangunan Hutbun masih terbatas; Upaya yang telah dilakukan oleh oleh Para Pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ciamis untuk mengatasi hambatan tersebut dalam menciptakan kinerja dilihat dari Aspek Kualitas SDM dengan cara peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, baik secara formal maupun informal.

Dari masalah yang terjadi tersebut, penyimpangan- penyimpangan terjadi dalam beberapa perangkat pegawai pemerintah daerah dan dinas Kabupaten Ciamis yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *good government governance* yang belum maksimal dan pemerintah daerah kabupaten Ciamis belum optimal dalam melakukan akuntabilitas kinerjanya terhadap publik, sehingga berpengaruh pula terhadap kualitas kinerja pegawai pemerintah daerah di Kabupaten Ciamis yang masih harus diperbaiki.

Dari hasil penelitian sebelumnyaoleh Garnita, Nita (2008), Auditya, Lucy dan Husaini (2013) bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikasn terhadap kinerja pemerintah daerah. Menurut Novianti, Leny dan Novie Susanti Suseno (2014) bahwa implementasi *good government governance* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja.Sedangkan menurut Soemantri Yusuf, Dedy (2009) dan Yuanida, Meitika (2010) bahwa terdapat pengaruh signifikan antara penerapan prinsip *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan konsep pemikiran yang tertuang dalam latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Good government governance* (GGG) dan Akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah di dinas SKPD kabupaten Ciamis.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Good government Governance*

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) dalam LAN & BPKP (2000:5), *good government governance* sebagai "T*he exercise of political, economic, and administrative authority tomanage a nation's affair at all levels".*

UNDP mendefinisikan *Good governance* adalah sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara Negara, sektor swasta dan masyarakat, dalam prinsip-prinsip; partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsesus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggung jawab serta visi stratejik.

Sedangkan menurut *World Bank* dalam LAN & BPKP (2000:) Definisi *good governance* sebagai "*the way state power is used in managing economic and social recources for development and society".* World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Menurut Wiranto (2012:1) dalam Auditya, Lucy dkk (2013) mengatakan bahwa: *"Good governance* dapat dipahami sebagai implementasi otoritas politik, ekonomi, dan administratif dalam proses manajemen berbagai urusan publik pada berbagai level dalam suatu negara".

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 dalam Siregar, Muhammad Arifin (2008), tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, dalam penjelasan Pasal 2 (d) mengartikan "Kepemerintahan yang baik sebagai kepemimpinan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparasi,

pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hokum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat".

Dari beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa *good governance* merupakan tata kelola pemerintah yang baik yang mengatur pemerintahan dan hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, ekonomi dan politik yang dilakukan dengan mematuhi prinsip *good governance* dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Akuntabilitas

Menurut LAN dan BPKP (2000) dalam Santosa, urip dan Yohanes (2008): Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Syahrudi Rasul (2002:8), "Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi".

Menurut Mardiasmo (2009:18) ,"Akuntabilitas adalah pertanggung-jawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan". Sedangkan menurut Mardiasmo (2002:20), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah *(principal)* yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut.

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kepada pemberi amanah atas kinerja program atau kegiatan yang telah dilakukan.

2.1.3 Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Mahsun (2006:4) dalam Auditya, Lucy dkk (2013) menyatakan bahwa Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Sedangkang menurut Bastian (2010:274) dalam Auditya, Lucy dkk (2013), Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi.

Dalam PP No. 58 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 35 menyatakan: Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dalam MenPAN(2007) menyatakan: Kinerja Instansi Pemerintah adalah "gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Menurut Arsyiaty, dkk (2008) dalam Usman dan Lukman (2014), Kinerja instansi merupakan tingkat pencapaian hasil dari suatu kegiatan dalam sebuah instansi pemerintah sehubungan dengan penggunaan dana sesuai dengan kuantitas dan kualitas terukur dengan menggunakan prinsip efisiensi dan efektifitas.

Dari beberapa pengertian di atas, kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan standar tertentu dan bertanggungjawab untuk memberikan laporan kepada pemberi kerja.

2.2 Kerangka Pemikiran

Laporan kinerja pemerintah daerah, dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pemerintah (LPJ) dan laporan keuangan. Sesuai dengan ketentuan UU No.32 dan 33 Tahun 2004, PP No. 24 Tahun 2005, dan PP No. 58 Tahun 2005, pemerintah daerah disyaratkan untuk dapat menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bagian dari LKPJ Kepala Daerah. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 31 mengatur bahwa Kepala Daerah harus memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Menurut PerMenPAN Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kineja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (PerPres Nomor 29 Tahun 2014).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, *United Nation Development Program* (UNDP) dalam LAN dan BPKP (2004) dalam Kusmayadi, Dedi (2009), akuntabilitas merupakan elemen terpenting dan menjadi prinsip pokok dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik *(good governance).*

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2014:96) mengungkapkan bahwa: “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba menyatakan hipotesis penelitian sebagai berikut:

a. *Good government governance* berpengaruh terhadap Kinerja Instansi pemerintah.

b. Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Instansi pemerintah.

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

1. Objek Penelitian

Menurut Husein Umar (2005:303) dalam bukunya menerangkan bahwa: “Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga di mana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu”.

Menurut Sugiyono (2006:13) pengertian Objek Penelitian adalah sebagai berikut: “Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, *valid*, dan *reliable* tentang suatu hal (variabel tertentu)”.

2. Metode Penelitian

Menurut I made wirartha (2006:68), “Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah”. Sedangkan menurut Sugiyono (2010:2), “Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.

Pengertian dari metode deskriptif menurut Moh. Nazir (2005:54) menyebutkan: "Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang".

Menurut Sugiyono (2012:35), "Metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel satu dengan yang lain".

Menurut Juliansyah Noor (2012:20), "Metode verifikatif penelitian dilaksanakan untuk menguji kebenaran dari sesuatu (ilmu pengetahuan) yang telah ada data penelitian yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya kerugian terhadap informasi atau ilmu pengetahuan tertentu".

Metode deskriptif digunakan untuk menjabarkan atau mengeksplorasi suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.

Sementara itu metode verifikatif digunakan untuk menguji kebenaran suatu teori, pengujian dilakukan menggunakan suatu hipotesis apakah diterima atu ditolak. Penelitian ini ditujukan untuk menguji hipotesis dengan alat uji statistik, yaitu analisis jalur (*path analysis*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel *Good government governance* (X1) dan akuntabilitas (X2) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

3.2.1 Operasionalisasi variabel

Operasional variabel menurut Sugiyono (2010:58) adalah: "Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya".

Operasionalisasi variabel ini diperlukan untuk menentukan indikator, jenis, skala untuk mengukur konsep dan cara sebuah konsep harus diukur, sehingga terdapat variabel-variabel yang saling mempengaruhi. Dan pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik ini dapat dilakukan secara benar, sesuai dengan judul penelitian mengenai Pengaruh *Good government governance* dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

Variabel penelitian menurut Sugiyono (2012:59), "Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang objek atau kegiatan yang mempunyai variasi yang tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya". Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang dapat diukur dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Variabel bebas (*Independent variable)* (X)
   Menurut Sugiyono (2010:39), "Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat)". Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas (*independent variable*), yaitu *Good government governance* (X_1) dan Akuntabilitas (X_2).
2. Variabel Dependent (*dependent variable*)
   Menurut Sugiyono (2010:33), "Variabel dependen atau terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas". Dalam penelitian ini yang menjadi variabel *dependent* (Y) adalah Kinerja Instansi Pemerintah.

3.2.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini terdiri dari tiga cara, yaitu penelitian lapangan (*field research)*, studi kepustakaan (*library research)* dan riset internet(*online research).* Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu pengumpulan data secara langsung dengan mengadakan penelitian terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data primer, dengan melakukan:

a. Observasi, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati langsung keadaan lembaga yang menjadi objek penelitian. Wawancara, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan objek penelitian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai masalah-masalah yang akan diteliti.
b. Kuesioner, yaitu alat bantu bagi penulis dalam melakukan penelitian, metode ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tertutup, yaitu bentuk pertanyaan yang dilengkapi disertai dengan sejumlah alternatif atau kategori jawaban, sehingga responden tinggal memilih salah satu alternatif kategori pilihan jawaban tersebut sesuai dengan pilihannya.

2) Penelitian kepustakaan (*Library Research*)
Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori guna mendukung data primer yang diperoleh selama penelitian, data ini diperoleh dari referensi buku serta referensi lainnya.

3) Riset Internet (Online Research)
Pengumpulan data berasal dari situs-situs internet terkait untuk memperoleh tambahan literatur, jurnal dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.2.3 Populasi dan Sampel

Pengertian populasi menurut Sugiyono (2009:155) mengemukakan bahwa: "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan."

Berdasarkan definisi diatas, populasi adalah objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk penelitian, untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang tetapi bisa juga berupa dokumen-dokumen dan file-file yang dapat dianggap sebagai objek penelitian. Sedangkan populasi penelitian adalah populasi yang digunakan untuk menjadi sasaran penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pada 13 dinas yang berada di pemerintahan daerah Kabupaten Ciamis.

Pengertian dari *sampling* jenuh atau sensus menurut **Sugiyono** (2006:78**)**, adalah: "*Sampling* jenuh atau sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain *sampling* jenuh adalah sensus."

Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 42 orang pegawai dan kepala dari 13 dinas SKPD Kabupaten Ciamis.

3.2.4 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah dengan melakukan langkah-langkah berikut:

1. Analisis Deskriptif

Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta yang ada di lapangan untuk selanjutnya diolah menjadi data. Data tersebut kemudian dianalisis dan untuk memperoleh suatu kesimpulan.

2. Rancangan Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif merupakan analisis yang digunakan untuk membahas data kuantitatif. Data yang telah dikumpulkan melalui kuisioner akan diolah dengan pendekatan verifikatif. Terlebih dahulu dilakukan tabulasi dan memberikan nilai sesuai dengan sistem yang

ditetapkan. Jenis kuisioner yang digunakan adalah kuisioner tertutup dengan menggunakan skala ordinal.

Data yang digunakan untuk variabel *good government governance* (X_1), Akuntabilitas (X_2) dan kinerja instansi pemerintah (Y) merupakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner dan menggunakan skala ordinal. Karena penelitian ini menggunakan data ordinal, maka semua data ordinal yang terkumpul terlebih dahulu akan ditransformasi menjadi skala interval dengan menggunakan *Method of Successive Interval* (Harun Al Rasyid, 1994:131).

Menurut Syarifudin Hidayat (2005:55), pengertian *method of successive interval* adalah sebagai berikut: "Metode penskalaan untuk menaikan skala pengukuran ordinal ke skala pengukuran interval".

Selanjutnya analisis yang digunakan dalam metode penelitian verifikatif adalah :

1. Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Dalam penelitian ini, analisis jalur (*path analysis*) digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat, dengan tujuan menerangkan akibat langsung dan akibat tidak langsung seperangkat variabel, sebagai variabel penyebab terhadap variabel lainnya yang merupakan variabel akibat. Menurut Ating Somantri dan Sambas Ali Muhidin (2006:259) Analisis Jalur (*Path Analysis*) mengemukakan bahwa : "Analisis jalur (*path analysis*) digunakan apabila secara teori kita yakin berhadapan dengan masalah yang berhubungan sebab akibat. Tujuanya adalah menerangkan akibat langsung dan tidak langsung seperangkat variabel, sebagai variabel penyebab, terhadap variabel lainnya yang merupakan variabel akibat".

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Penjelasan garis regresi menurut Andi Supangat (2007:352) yaitu: "Garis regresi (regression line/line of the best fit/estimating line) adalah suatu garis yang ditarik diantara titik-titik (scatter diagram) sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk menaksir besarnya variabel yang satu berdasarkan variabel yang lain, dan dapat juga dipergunakan untuk mengetahui macam korelasinya (positif atau negatifnya)".

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh *Good government governance* dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Analisis Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Korelasi juga tidak menunjukkan hubungan fungsional. Dengan kata lain, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen.

4. Koefisien Determinasi

Analisis Koefisiensi Determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X1 dan X2) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Pengujian Alat Analisis

1. Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk menguji validitas setiap item pertanyaan dalam mengukur variabelnya. Uji validitas ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor tiap item dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor item. Item yang mempunyai korelasi positif dengan skor total korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Nilai korelasi minimum

untuk item yang dianggap valid adalah sebesar 0,3. Jadi jika skor total kurang dari 0,3 makan item dalam instrument tersebut tidak valid

Hasil uji validitas yang di peroleh untuk kuesioner variabel *good governance* (X1), akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah, memperlihatkan bahwa nilai korelasi (r) untuk skor item dengan total skor berada di atas 0,3 maka semua item valid.

2. Uji Realibilitas

Pengujian relibilitas dengan koefisien *Split Half* digunakan untuk mengetahui keandalan kuesioner sebagai alat ukur. Hasil yang dapat diterima oleh koefisien positif jika nilai realibilitas di atas 0,7. Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan sudah reliabel karena nilai reliabilitas kuesioner di atas 0,7.

4.1.2 Analisis Deskriptif

1. *Good government governance* (X_1)

Variabel *Good government governance* diukur dengan 10 indikator , yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efesiensi & efektifitas dan profesionalisme. Untuk menilai masing-masing indikator penulis menggunakan nilai persentase skor ideal dengan skor total.

Persentase total skor tanggapan responden pada variabel *good governance* sebesar **69,41**% yaitu berada pada interval 68.00% - 84.00%. *Good governance* secara umum masuk dalam kategori baik. Semua indikator yang di teliti menampakan hasil yang baik.

2. Analisis Deskriptif Akuntabilitas

Variabel akuntabilitas diukur dengan 3 indikator, yaitu akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat dan akuntabilitas prosedural. Untuk menilai masing-masing indikator penulis menggunakan nilai persentase skor ideal dengan skor total.

Persentase total skor tanggapan responden pada variabel akuntabilitas sebesar 58,41% yaitu berada pada interval 52.01% - 68.00%. Akuntabilitas secara umum masuk dalam kategori cukup baik.

Hasil tanggapan responden mengenai Akuntabilitas untuk ketiga indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 6 butir pernyataan akan diuraikan dalam tabel distribusi frekuensi. berikut merupakan tanggapan responden berdasarkan butir pernyataan pada masing-masing indikator.

3. Analisis Deskriptif Kinerja Instansi Pemerintah

Variabel kinerja instansi pemerintah diukur dengan 3 indikator, yaitu efektivitas, pertumbuhan karyawan dan kepuasan pelanggan. Untuk menilai masing-masing indikator penulis menggunakan nilai persentase skor ideal dengan skor total.

Persentase total skor tanggapan responden pada variabel kinerja instansi pemerintah sebesar 54**,60**% yaitu berada pada interval 52.01% - 68.00%. Kinerja instansi pemerintah secara umum masuk dalam kategori cukup baik. Namun dalam indikator kepuasan pelanggan, belum menampakkan hasil yang baik.

Hasil tanggapan responden mengenai Kinerja Instansi Pemerintah untuk ketiga indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 4 butir pernyataan akan diuraikan dalam tabel distribusi frekuensi.

4.1.3 Analisis Verifikatif

1) Analisis jalur

Untuk melihat nilai koefisien jalur dapat dilihat pada kolom *standardized coefficients* atau disebut koefisien beta. Koefisien jalur X_1 (*good government governance*) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y) yang diperoleh (yx_1) adalah sebesar 0,251. Dari nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa *good governance* memiliki pengaruh langsung terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, karena variabel *good governance* memiliki tingkat signifikansi <0,05%. Sedangkan nilai koefisien jalur yang diperoleh variabel akuntabilitas (X2) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y), diperoleh (yx_2) sebesar 0,773 dengan signifikansi <0,05. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa Akuntabilitas berpengaruh secara langsung terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis sebesar 77,3%.

2) Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk menguji keterkaitan atau hubungan antara besarnya variabel *good governance* dan akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah, maka digunakanlah berbagai metode statistika matematika antara lain metode Regresi Linier Berganda, metode Korelasi Berganda, dan metode Korelasi Determinasi.

Persamaan regresi ganda yang diperoleh dari analisis yaitu Y = 3,100 + 0,090 X_1 + 0,587 X_2 persamaan regresi tersebut bahwa harga $\propto_1$ = 0,090 bertanda positif dan harga $\propto_2$ = 0,587 bertanda positif.

Dengan demikian terdapat hubungan yang positif antara *good governance* (X1) dengan Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Dengan kata lain, dari persamaan di atas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 3,100 menyatakan bahwa besarnya Y adalah 3,100 dengan asumsi bahwa X1 dan X2 bernilai constant.
2. Koefisien regresi X1 sebesar 0,090 menyatakan bahwa setiap penambahan 1(satu) nilai X1 akan meningkatkan Y sebesar 0,090.
3. Koefisien regresi X2 sebesar 0,587 menyatakan bahwa setiap penambahan 1(satu) nilai X2 akan meningkatkan Y yaitu sebesar 0,587.

3) Koefisien Korelasi

Dari data yang telah ditransformasikan menjadi skala interval dihitung skor total untuk setiap *variabel* X1 (*Good governance*), X2 (Akuntabilitas), Y (Kinerja Instansi Pemerintah) kemudian dihitung nilai korelasi antar variabel dengan menggunakan rumus korelasi *pearson product moment*. Nilai koefisien korelasi menunjukan seberapa besar keterkaitan hubungan antar variabel yang diteliti.

Dari hasil perhitungan diperoleh koefisien korelasi antara *Good governance* dengan kinerja instansi pemerintah adalah sebesar 0,794. Jika diinterpretasikan korelasi *Good governance* dengan kinerja instansi pemerintah memiliki hubungan dengan kategori cukup tinggi karena berkisar antara 0,61 – 0,80 dan arahnya positif. Ini berarti terdapat hubungan yang sangat kuat antara *Good governance* dengan kinerja instansi pemerintah. Jika pelaksanaan *good governance* baik maka kinerja instansi pemerintah daerahnya pun baik.

Koefisien korelasi antara akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah adalah sebesar 0,957. Keterkaitan hubungan antara akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah termasuk dalam kategori korelasi tinggi karena berkisar antara 0,80 – 1 dan arahnya positif. Ini berarti terdapat hubungan yang sangat kuat antara Akuntabilitas dn Kinerja Instansi Pemerintah.

4) Uji Determinasi

1) Pengaruh *Good governance* (X_1) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Analisis koefisien determinasi (R^2) yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Maksudnya terdiri dari beberapa variabel independen *Good governance* (X1) yang mempengaruhi variabel dependen Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Berdasarkan hasil output SPSS 20 tabel di atas nilai R sebesar 0,671 artinya variabel *good governance* (X1) mempunyai hubungan yang cukup kuat dengan Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

Sedangkan nilai koefisien determinasi R^2 (R Square) sebesar 0,671 atau 67,1%. Dengan kata lain, pengaruh *good governance* (X1) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y) adalah sebesar 67,1%.

2) Pengaruh Akuntabilitas (X2) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Analisis koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan pengaruh variabel independen Akuntabilitas (X2) yang mempengaruhi variabel dependen Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Berdasarkan hasil output SPSS 20 tabel di atas nilai R sebesar 0,917 artinya variabel Akuntabilitas (X2) mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

Sedangkan nilai koefisien determinasi R^2 (R Square) sebesar 0,917 atau 91,7%. Dengan kata lain, pengaruh Akuntabilitas (X2) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y) adalah sebesar 91,7%.

3) Pengaruh Akuntabilitas (X2) dan Akuntabilitas (X2) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Analisis koefisien determinasi (R^2) yang di gunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Maksudnya terdiri dari beberapa variabel independen (X1, X2) yang mempengaruhi variabel dependen (Y).

Koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel Model Summary (hasil output olah data) **R^2** (*Adjusted R Square*). Nilai R^2 adalah sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sedangkan dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak di teliti.

Berdasarkan hasil output SPSS 20 nilai R sebesar 0,935 artinya variabel *good governance* (X_1) dan akuntabilitas (X_2) mempunyai hubungan yang kuat dengan Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Sedangkan nilai koefisien determinasi R^2 (R Square) sebesar 0,946 atau 93,5%. Dengan kata lain, pengaruh X_1 dan X_2 secara bersama-sama terhadap Y adalah sebesar 93,5%. Sedangkan sisanya 6,5% ditentukan oleh faktor-faktor lainnya diluar X_1 dan X_2 terhadap Y.

4.1.4 Pengujian Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Nilai t hitung diperoleh dengan menggunakan bantuan aplikasi *SPSS for windows version 20.* Selanjutnya akan dibandingkan nilai t hitung dengan tingkat kesalahan ($\propto$=5%) derajat kebebasan (df) = (n-k). kiteria pengambilan keputusan :

H_0 diterima jika thitung < t_{tabeln}

Ha diterima jika thitung > t_{tabel}

2. Uji t Variabel X_1

Perumusan hipotesis untuk pengambilan keputusan :

H_0: Tidak ada pengaruh X_1 terhadap Y

H_1: Ada pengaruh X_1 terhadap Y

Kiteria pengambilan keputusan

H_0: diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$

Ha diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$

Nilai statistik uji t untuk menguji hipotesis diatas diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

$$t = \frac{\rho_{zy}}{\sqrt{\frac{(1-R^2_{zy})}{n-2}}}$$

$$t \frac{0{,}972}{\sqrt{\frac{(1-0{,}946}{13-2}}}$$

$$t = 2{,}229$$

Diperoleh thitung untuk *variabel* X1 sebesar 7,133. Dengan derajat kebebasan (df) = n-2 = 70-2 = 68, di dengan demikian kriteria pengambilan keputusannya adalah : karena besarnya thitung 2,229> t tabel 2,201, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima yang bearti secara parsial (sendiri-sendiri) *good governance* (X_1) mempengaruhi Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

3. Uji t Variabel X_2

Perumusan hipotesis untuk pengambilan keputusan :

H_0: Tidak ada pengaruh X2 terhadap Y

H_1: Ada pengaruh X2 terhadap Y

Kiteria pengambilan keputusan

H_0 diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$

Ha diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$

Diperoleh thitung untuk variabel X_1 sebesar 7,096. Dengan derajat kebebasan (df) = n-2 = 13-2 = 11, dengan demikian kriteria pengambilan keputusannya adalah : karena besarnya thitung 7,096> t_{tabel} 2,201, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima yang bearti secara parsial (sendiri-sendiri) Akuntabilitas (X_2) mempengaruhi Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

4. Uji Simultan (Uji F)

Perumusan hipotesis untuk pengambilan keputusan :

H_0: Tidak ada pengaruh X1 dan X2 terhadap Y

H_1: Ada pengaruh X1 dan X2 terhadap Y

Kiteria pengambilan keputusan

H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$

Ha diterima jika $F_{hitung} > Ft_{tabel}$

Nilai f hitung sebesar 86.804. Pada taraf signifikansi5% (0,000 < 0,05) diperoleh Ftabel = 2,14. Nilai f_{hitung} > f tabel (86.804> 2,14), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa *good governance (*X_1) dan Akuntabilitas (X_2) berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

4.1 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh *Good government governance* terhadap Kinerja Akuntansi Pemerintah

Dalam penelitian Hermanson (2003), mengenai hubungan antara penerapan *Good government governance* dengan kinerja organisasi menyatakan bahwa: Penerapan *Good government governance* berasosiasi dengan kinerja organisasi. Suatu organisasi akan sangat terbantu kinerjanya apabila dalam organisasi tersebut menerapkan *Good government governance*, begitu juga dalam pemerintahan apabila *Good government governance*-nya bagus maka kinerjanya juga akan bagus, dan hal itu akan membuat output yang dihasilkan juga akan bagus. Hal tersebut menunjukkan bahwa kewajiban penerapan *Good government governance* merupakan suatu hal yang tepat.dalam suatu pemerintah.

Menurut Pratikno (2009:10), *Good governance* selain merujuk mekanisme pasar yang dianggap paling efisien dalam pengelolaan sumberdaya, *good governance* juga dirumuskan sebagai pola pemerintahan yang demokratis. *Good governance* sebagai *democratic politics* ini ditandai oleh beberapa karakter, seperti transparansi, partisipasi, representasi, akuntabilitas dan penegakkan hak asasi manusia. Sedangkan menurut Tjokroamidjojo (2006:11) "*good governance*" dapat dicapai melalui pengaturan yang tepat dari fungsi pasar dengan fungsi organisasi termasuk organisasi publik sehingga dicapai transaksi-transaksi dengan biaya transaksi paling rendah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil dari nilai korelasi *good governance* dengan variabel Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebesar 0,737. Nilai korelasi bertanda positif, yang menunjukkan bahwa yang terjadi antara variabel *good governance* dengan variabel Kinerja Instansi Pemerintah adalah searah. Dimana semakin tinggi *good governance*, maka akan diikuti pula oleh semakin baiknya Kinerja Instansi Pemerintah. Tingkat keeratan korelasi 0,737 termasuk ke dalam kategori hubungan cukup tinggi karena berada pada interval 0.61 – 0, 80.

Koefisien jalur X1 (*good government governance*) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y) yang diperoleh (yx_1) adalah sebesar 0,251. Dari nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa *good governance* memiliki pengaruh langsung terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, karena variabel *good governance* memiliki tingkat signifikansi <0,05%.

Hasil dari koefisien determinasi berdasarkan hasil output SPSS 20 tabel di atas nilai R sebesar 0,671 artinya variabel *good governance* (X_1) mempunyai hubungan yang cukup kuat dengan Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Sedangkan nilai koefisien determinasi R^2 (R Square) sebesar 0,671 atau 67,1%. Dengan kata lain, pengaruh *good governance* (X_1) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y) adalah sebesar 67,1%.

Hasil penelitian ini juga di dukung oleh penelitian Suryo Patolo mengenai "Peran *Good government governance* Untuk Mewujudkan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan Kepuasan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah Dalam Menghadapi Tantangan Global". Adapun hasil penelitiannya menyatakan bahwa prinsip –prinsip *Good governance* berpengaruh secara simultan dan parsial sebesar 69,826, dengan nilai sigifinsi sebesar 0,000.

4.2.2 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Akuntansi Pemerintah

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggujawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Koefisien korelasi antara akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah adalah sebesar 0,957. Keterkaitan hubungan antara akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah termasuk dalam kategori korelasi tinggi karena berkisar antara 0,80 – 1 dan arahnya positif. Ini berarti terdapat hubungan yang sangat kuat antara Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun hasil output SPSS 20 atas uji determinasi diperoleh nilai R sebesar 0,917 artinya variabel Akuntabilitas (X_2) mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

Sedangkan nilai koefisien determinasi R^2 (R Square) sebesar 0,917 atau 91,7%. Dengan kata lain, pengaruh Akuntabilitas (X_2) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y) adalah sebesar 91,7%.

Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan akuntabilitas mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap kinerja instansi pemerintah yaitu sebesar 0,648. Dan akuntabilitas juga berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah yaitu sebesar 42%.

4.2.3 Pengaruh *Good Government Governance* dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut PP No.101 tahun (2000) "Ciri-ciri untuk mewujudkan *good governance* yaitu: Profesionalitas, akutantabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat".

Berdasarkan hasil output SPSS 20 tabel di atas nilai R sebesar 0,935 artinya variabel *good governance* (X_1) dan Akuntabilitas (X_2) mempunyai hubungan yang kuat dengan Y. Sedangkan nilai koefisien determinasi R^2 (R Square) sebesar 0,935 atau 93,5%. Dengan kata lain, pengaruh variabel *good governance* (X_1) dan Akuntabilitas (X_2) secara bersama-sama terhadap Y adalah sebesar 93,5%. Sedangkan sisanya 6,5% ditentukan oleh faktor-faktor lainnya diluar X_1 dan X_2 terhadap Y.

Selanjutnya dari hasil uji regresi linier berganda didapatkan persamaan regresi ganda yang diperoleh dari analisis yaitu Y = 3,100 + 0,090 X_1 + 0,587 X_2 persamaan regresi tersebut bahwa harga $\propto_1$ = 0,090 bertanda positif dan harga $\propto_2$ = 0,587 bertanda positif.

V. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, mengenai Pengaruh *Good government Governance* dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah, maka penulis menarik kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. ***Good Government Governance***

Pelaksanaan *good governance* di dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah berjalan dengan cukup baik. Ini dapat terlihat dari skor tanggapan responden (42 orang pegawai dinas Kabupaten Ciamis) atas pernyataan tiap indikator secara keseluruhan adalah sebesar 67,76%. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel *good governance* termasuk dalam kategori cukup baik. Hal ini membuktikan bahwa prinsip- prinsip *good governance* seperti partisipasi, transparansi dan akuntabilitas telah dijalankan dengan cukup baik oleh Pemerintah daerah Kabupaten Ciamis.

2. **Akuntabilitas**

Dari hasil skor tanggapan responden berkenaan dengan akuntabilitas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas di Dinas SKPD Kabupaten Ciamis telah dilakukan dengan cukup baik. Hasil tanggapan responden pada variabel akuntabilitas yaitu sebesar 58,41%. Dari hasil tersebut, secara umum indikator Akuntabilitas yang diteliti seperti Akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat dan akuntabilitas prosedural telah dijalankan dengan cukup baik.

3. **Kinerja Instansi Pemerintah**

Berdasarkan hasil tanggapan responden, kinerja Instansi Pemerintah pada dinas SKPD Kabupaten Ciamis telah berjalan dengan cukup baik. Ini sesuai dengan skor jawaban responden yaitu sebesar 54,60%. Namun dalam indikator kepuasan pelanggan, masih menunjukkan hasil yang kurang baik yaitu sebesar 49,28%. Sehingga dari variabel kinerja instansi pemerintah, dapat disimpulkan bahwa kinerja instansi pemerintah sudah cukup efisien dan pelatihan terhadap sumber daya manusia sudah dijalankan dengan cukup baik, namun pemberian

layanan dan fasilitas yang tersedia belum cukup memadai, sehingga masyarakat belum puas atas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Ciamis.

4. Pengaruh *Good governance* dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS, diperoleh data yang menunjukkan bahwa secara parsial *good governance* berpengaruh signifikan terhadap Kinerja instansi Pemerintah sebesar 67,1%. Ini mengandung pengertian bahwa *good governance* memiliki pengaruh yang kuat terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Pengaruh *Good governance* dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil pengujian determinasi menggunakan SPSS dinyatakan bahwa pengaruh akuntabilitas secara parsial terhadap kinerja instansi pemerintah adalah sebesar 91,7%. Ini mengandung pengertian bahwa variabel akuntabilitas mempunyai hubungan yang cukup kuat dengan Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Pengaruh *Good governance* dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Secara simultan *good governance* dan akuntabilitas berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kinerja Instansi pemerintah. Ini dibuktikan dengan hasil uji determinasi yaitu sebesar 93,5%. Ini mengandung pengertian bahwa pengaruh *good governance* dan akuntabilitas memiliki pengaruh yang kuat. Sedangkan sisanya 6,5% ditentukan oleh faktor-faktor lainnya diluar X_1 dan X_2 terhadap Y.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh, penulis mengajukan saran yang diharapkan menjadi masukan yang dapat berguna bagi pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *good governance* dan Akuntabilitas di Dinas SKPD Kabupaten Ciamis telah dilaksanakan dengan cukup baik. Penulis berharap Pemerintah daerah Kabupaten Ciamis dapat mempertahahankan pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dan akuntabilitas dengan baik. Untuk pelaksanaan kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Ciamis juga telah dilaksanakan dengan cukup baik, namun dalam pelayanan terhadap masyarakat dan penyediaan sarana dan fasilitias untuk masih perlu di perbaiki, sehingga masyarakat puas atas kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ciamis.
2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan dan memperluas penelitian, sehingga dapat diperoleh faktor lain yang dapat mempengaruhi Kinerja Instansi Pemerintah dan penelitian ini dapat berguna menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

LAN. 2011. Instrument Akuntabilitas Bidang Auditif. Jakarta: LAN.

UNDP. 2008. *KajianPengeluaranPublik Indonesia 2007*. Jakarta: Kemitraan.

Agus, Dwiyanto. 2006. *Mewujudkandkan good governance melalui pelayananpublik*. hal. 90 Yogyakarta: UGM Press.

Agus, Dwiyanto. 2006. *Mewujudkan Good GeovernanceMelaluiPelayanan Public*. hal. 78. Yogyakarta: UGM Press.

Dwiyanto, Agus. 2011. *Mengembalikan kepercayaan Publik melalui Reformasi Birokrasi.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

LAN & BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance.* Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Data ICW (2003)

Rasul, Syahrudin, 2003. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PNRI

Turner, Mark and Hulme, David ,1997. *Governance, Administrasi, and Development: Making The State Work*. London: MacMillan Press Ltd.

B. Guy Peters, (2000), "*The Politics of Bureaucracy*", London : Routledge, hal 299-381)

Dwiyanto, Agus, 2006, Mewujudkan *Good Governance Melalui Pelayanan Publik,* Yogyakarta: Gajah Mada Universty Press

Husein Umar, 2005, "Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis", Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Moh. Nazir. Ph.D, 2005, Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Bogor.

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif".* Bandung : ALFABETA

I Made Wirartha, 2006, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis*,* Yogyakarta : Andi.

Sugiyono, Dr. 2010. Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Penerbit ALFABETA

Noor, Juliansyah. 2012. Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Umi Narimawati. 2010. Penulisan Karya Ilmiah. Bekasi: Penerbit Ganesis

Husein Umar, 2005. Metode Penelitian. Jakarta : Salemba Empat

Nofianti, Leny dan Novie, 2014. Factors Affecting Implementation of good government governance (GGG) and their implications towards performance accountability. *Procedia Social and Behavioral Sciences.*

Solikin, Solikin. 2009. Penerapan system akuntansi sekor publik dalam mewujudkan Good governace dan implikasi terhadap layanan. *Percikan* :Vol.102

Kusmayadi, Dedi. 2009. Pengaruh Pengawasan Intern Dan Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap Good Government Governance. *Jurnal Ichsan Gorontalo*Vol.4 No.2

Sadjiarto, Arja. 2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol.2, No.2

Auditya, Lucy dan Husaini. 2013. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness* Volume 3, Nomor 1.

Alwi. 2008. Reformasi Profesi Akuntansi Sektor Publik dan Good Government Governance. *Ilmiah* Volume 1 No.1

Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol. 2, No. 1

Sande, Peggy. 2013. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesbilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Skripsi.*

Tresnawati, Rina. 2012. Pengaruh Efektifitas Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. *Forum Bisnis & Keuangan I.*

Ait Novatiani, R dan Nurmalita. 2012. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparasi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Apbd) Di Dprd Kota Bandung. *Skripsi.*

Selamat, Melani Dwiyanti. 2013. Penerapan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Siregar, Muhammad Arifin. 2008. Penerapan Tata Kepemerintahan Yang Baik dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan Provinsi Bengkulu. *Tesis.*

Amelia, Ira , dkk. 2012. Pengaruh *Good Governance*, Pengendalian Intern, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah.

Soemantri Yusuf, Dedy. 2009. Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah daerah Kota Bandung.

Solihin, Dadang. 2007. *Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia.* Bandung: BAPPENAS.

Astuti, Ratih Widya. 2011. Persepsi Terhadap Pengembangan Sistem Pengukuran, Akuntabilitas, Dan Penggunaan Informasi Kinerja Di Instansi Pemerintah. *Skripsi.*

IFAC. 2012. Public Sector Financial Management Transparency And Accountability: The Use Of International Public Sector Accounting Standards. *IFAC Policy Position.*

Badruzaman, Jajang dan Irna. 2010. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Terhadap Penerapan *Good Governance.*

Mairi, Rizani dkk. 2014. Performance Accountability of Local Government (Case study on Presentation of Performance Accountability Report and Budget Reports on Office of Management of Regional Revenue, Financial and Assets in Hulu Sungai Selatan Regency). *Public Policy and Administration* Research ISSN 2224-5731 Vol.4, No.8

Desmiyawati dan Wulan. 2012. Pengaruh komitmen organisasi, pengendalian intern Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Organisasi. *Pekbis Jurnal,* Vol.4, No 1

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Yogyakarta: Graha ilmu.

Usman dan Lukman. 2014. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Skpd Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango. *Skripsi.*

Winanti, Marliana Budhiningtias. 2011. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan (Survei Pada Pt. Frisian Flag Indonesia Wilayah Jawa Barat). *Majalah UNIKOM bidang HUMANIORA* Vol.7, No.2

Sudrajat, Tedi. 2009. Perwujudan Good Governance Melalui Format Reformasi Birokrasi Publik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.9 No.2

Asian Development Bank. 1999. *Governance* : Sound Development Management,

Archon, Fung & Erik Olin Wright.2003. *Deepening Democracy :Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance, The Real Utopias Project IV*.London : Verso.

Budiardjo Miriam. 2000. Menggapai Kedaulatan untuk Rakyat, Bandung :Mizan.

Catanese, Anthony James (1984), The Politics of Planning & Development,Sage Library of Social Research, Volume 156, Beverly Hills : Sage Publications

Development Assistant Committee, (1997), Evaluation of Programs Promoting Participatory Development & Good Governance.

Ganie-Rochman, Meuthia.2000. Artikel "Good Governance : Prinsip, Komponen dan Penerapannya", dalam HAM : Penyelenggaraan Negara Yang Baik dan Masyarakat Warga, Jakarta : KOMNAS HAM.

Garcia-Zamor, Jean-Claude, (1985), Public Participation in Development Planning and Management : Cases from Africa and Asia, London : Westvoiew Press.

Hill, Michael (1997), The Policy Process, London : Prentice Hall/Harvester

Wheatsheaf. Hill, Michael & Peter Hupe.2002. *Implementing Public Policy : Governance in Theory and in Practice.* London : Sage Publications.

Lutrin, Carl E. dan Allen K. Settle, (1985), American Public Administration :Concepts & Cases, USA : Prentice-Hall Inc.

Minogue, Martin, artikel "The Management of Public Change : from 'Old Public Administration' to 'New Public Management'" dalam "Law & Governance" Issue I, British Council Briefing.

Peters, B.Guy. 2000. *The Politics of Bureaucracy*, London : Routledge.

Schmidt, Gregory D. (1989), Donors and Decentralization in Developing Countries : Insights from AID Experience in Peru, London : Westview Press.

Shafritz, Jay M. & E.W. Russell, (1997), *Introducing Public Administration*. USA : Longman.

Sutherland, John W. (1978), Management Handbook for Public Administrators, New York : Van Nostrand Reinhold Company

Tjokroamidjojo, Bintoro. 2001. *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: MIA – UNKRIS.

Dra.LOINA Lalolo Krina P. 2003. Sekretariat *Good Public Governance* Badan Perencanaan Pembangunan Nasional -AGUSTUS 2003)

Sulistiyani, Ambar T. dan Rosidah.2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Graha Ilmu: Yogyakarta

Rivai, Veithzal dan Basri. 2005. Performance Appraisal: Sistem Yang Tepat Untuk Menilai Kinerja Karyawan Dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

PP No. 58 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 35

Guritno, Bambang dan Waridin. 2005. Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Perilaku Kepemimpinan, Kepuasan Kerja Dan Motivasi Terhadap Kinerja. JRBI. Vol 1. No 1. Hal: 63-74

Armstrong, Michael. 2004. *Performance Management*. Tugu Publisher. Nyutran (terjemahan).

Indra Bastian. 2001. *Akuntansi Sektor Publik ed.1*. Yogyakarta: Badan Penerbit FE UGM.

Mathis L. Robert-John H. Jackson. 2011. *Human Resources Management 10th ed*. Jakarta. Salemba Empat.

Marwansyah.2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia edisi kedua*. Bandung. Alfabeta.

Mondy, R.W., & Noe, R.M. 2005. *Human Resources Management 9th ed*. Massachusetts; Prentice-Hall.

http://www.slideshare.net/DadangSolihin/penerapan-good-governancedi-sektor-publik - meningkatkan- akuntabilitas- kinerja- lembaga- publik.

Garnita, Nita. 2008. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Skripsi.*

Ratiyas, anis. 2009. Pengaruh Akuntabilitas Ditinjau dari Konsep Good Governance Terhadap Peningkatan Kinerja Biro Humas, Protokol dan Umum Sekertariat Daerah Provinsi jawa Barat. *Skripsi.*

Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Bisnis. Cetakan keduabelas 2008. Penerbit Alfabeta, Bandung.

Sugiyono, Dr. 2010. Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Penerbit ALFABETA

Adrianto, Nico. 2007. *Good Governmnet:* Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government. Palangkaraya: Bayu Media.

Arikunto, S. 2006. Prosedur Peelitian Suatu Pendekatan Edisi Revisi VI. Jakarta : PT Rineks Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

PerMenPAN Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

PerPres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
PERDA NO 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.
http://www.ciamiskab.go.id/pemerintahan
https://isomudin63.wordpress.com/2015/02/24/pelaksanaan-good-governance-dalam-penyelenggaran-pendidikan-di-indonesia/
http://keuanganlsm.com/tata-kelola-yang-baikgoodgovernance/(diaksespada tanggal 24 juni 2015)
https://lawyersinbali.wordpress.com/2011/04/27/pengertian-good-governance/
https://id.wikipedia.org/wiki/Tata_laksana_pemerintahan_yang_baik
http://www.bangka.go.id/artikel.php?id_artikel=7
http://www.kajianpustaka.com/2012/12/teori-akuntabilitas.html
http://goodlocal governance.multiply.com/journal/item/6/Prinsip- prinsip Good Governance &show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem
http://good local governance.multiply.com/journal/item/5
http://kepriprov.go.id/id
http://www.goodgovernance.or.id
http://www.madani-ri.com/2006/03/15/prinsip-prinsip-good-governance
http://www.pkkod.lan.go.id
http://listi-lumbanraja.blogspot.kr/2012/10/prinsip-prinsip-good-governance.html
http://2frameit.blogspot.kr/2011/07/landasan-teori-good-governance.html
https://luckymanajemen.wordpress.com/2012/12/19/kinerja-dan-penilaian-kinerja-antara-harapan-dan-kenyataan-2/

LAMPIRAN

Tabel 1
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Variabel GGG (X1)

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Partisipasi	169	210	80,47%	Baik
2	Penegakan hukum	128	210	60,95%	Cukup Baik
3	Transparansi,	151	210	71,90%	Baik
4	Kesetaraan	144	210	68,57%	Baik
5	Daya tanggap	139	210	66,19%	Cukup Baik
6	Wawasan ke Depan	143	210	68,09%	Baik
7	Akuntabilitas	141	210	67,14%	Cukup Baik
8	Pengawasan	140	210	66,67%	Cukup Baik
9	Efisien dan Efektivitas	135	210	64,28%	Cukup Baik
10	Profesionalisme	133	210	63,33%	Cukup Baik
	Total	**1.423**	**2.100**	**67,76%**	**Cukup Baik**

Sumber: Data primer yang telah diolah,2015

Tabel 2
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Variabel Akuntabilitas(X2)

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Akuntabilitas Keuangan	**246**	420	58,57%	Cukup Baik
2	Akuntabilitas Manfaat	240	420	57,14%	Cukup Baik
3	Akuntabilitas Prosedural	250	420	59,52%	Cukup Baik
	Total	**736**	**1.260**	**58,41%**	**Cukup Baik**

Sumber: Data primer yang telah diolah,2015

Tabel 3
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Variabel Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Efektivitas	245	420	58,33%	Cukup Baik
2	Pertumbuhan Karyawan	236	420	56,19%	Cukup Baik
3	Kepuasan Pelanggan	207	420	49,28%	Kurang Baik
	Total	**688**	**1.260**	**54,60%**	**Cukup Baik**

Sumber: Data primer yang telah diolah,2015